

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negera Indonesia menjadi salah satu tujuan negara lain untuk berinvestasi baik di bidang pariwisata, pendidikan, infrastruktur, ekonomi maupun bidang lainnya. Hal ini dikarenakan perkembangan yang ditunjukkan Indonesia begitu pesat, dengan begitu Indonesia beserta semua kotanya dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya harus lebih kreatif dan inovatif. Dalam hal pariwisata dan pendidikan, di Indonesia terdapat beberapa kota besar yang mempunyai kualitas dan fasilitas yang baik, salah satu kota di Indonesia yang memiliki fasilitas dan kualitas yang baik adalah kota Bandung.

Kota Bandung menjadi kota metropolitan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat juga pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Luas wilayah kota Bandung adalah 167,31 km², dengan jumlah penduduk ditahun 2021 berjumlah 2.452.943 jiwa yang terdiri atas 1.235.134 jiwa penduduk laki-laki dan 1.217.809 jiwa penduduk perempuan.

Sebutan lain dari kota Bandung adalah kota kembang, karena zaman dulu kota ini di tumbuhi banyak bunga-bunga sehingga dinilai sangat cantik, juga karena keindahannya kota Bandung disebut *Paris Van Java*. Kota belanja juga termasuk julukan dari kota Bandung terdapat berbagai *mall* dan *factory outlet*, dan kota wisata kuliner. Dari segi bidang Pendidikan kota Bandung termasuk sebagai daftar

kota pelajar terbaik se-Asia Tenggara berdasarkan penilaian yang dilakukan QS Best Student Cities 2023 (Brilyana, 2022). Dengan berbagai potensi yang dimiliki Kota Bandung baik dari bidang pariwisata yang menyuguhkan berbagai destinasi wisata yang menarik maupun bidang Pendidikan yang terdapat berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang unggul, sehingga mengundang masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke kota Bandung. Akan tetapi, agar tidak menghambat proses perkembangan itu, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai dari segi fisik maupun non fisik. Diantaranya seperti tata guna, desain, prasarana dan sarana sebagai infrastruktur fisik, dan adapun non fisik seperti kegiatan perekonomian, hubungan sosial dan kegiatan lainnya. Dimana terus berkembangnya infrastruktur dan fasilitas yang disediakan akan berdampak baik bagi perkembangan suatu kota.

Transportasi merupakan bagian terpenting dari pengembangan suatu kota, dimana transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain yang menjadi tujuannya menggunakan kendaraan yang dapat digerakan manusia atau mesin, juga dapat memberikan rasa nyaman, aman dan cepat serta menyesuaikan dengan lingkungan sehingga kebutuhan hidup manusia terpenuhi. Transportasi sekarang ini meningkat yang juga beriringan dengan bertumbuhnya jumlah penduduk dan khususnya kota Bandung yang menjadi kota tujuan wisata, Pendidikan dan termasuk kota besar dan terpadat di Indonesia.

Dalam menghadapi kondisi pembangunan yang semakin maju dan juga modern, pemerintah Kota Bandung harus memperhatikan salah satu faktor yang menjadi sarana penting bagi aktivitas masyarakat, dalam hal ini yaitu keberadaan

jalan. Sehingga hendaknya jalan dirancang dengan memperhatikan karakteristik pejalan kaki yang bertujuan agar terciptanya keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan berjalan kaki merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan lain. Dalam sistem transportasi perkotaan pejalan kaki memiliki peranan penting.

Umumnya yang menjadi orientasi pembangunan sistem transportasi di suatu kota moda kendaraan bermotor, akan tetapi ruang bagi pejalan kaki semakin terpinggirkan sehingga ketersediaannya tidak memenuhi kebutuhan pergerakan pejalan kaki. Kualitas dan kuantitas ruang publik kota mengalami penurunan secara fisik dan non fisik. Undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyebutkan bahwa: “Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain”.

Namun pada kenyataannya, pejalan kaki di jalan menjadi bagian terlemah dari sistem lalu lintas karena kegagalan pemerintah dalam menerapkan peraturan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2009, setiap penyelenggara jalan baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas pejalan kaki berdasarkan pada ketentuan undang-undang.

Tabel 1. 1
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kota Bandung
(KM) 2019-2021

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2019	2020	2021
<i>Level of Government Authority</i>			
Negara/ <i>State</i>	43,63	43,63	43,63
Provinsi/ <i>Province</i>	38,45	38,45	38,45
Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	1 172,78	1 172,78	1 047,68
Jumlah/Total	1 254,86	1 254,86	1 129,70

Sumber: Kota Bandung dalam Angka 2022

Melihat data diatas bisa dikatakan bahwa panjang jalan yang ada di kota Bandung tahun 2019-2021 dengan total 1.129,70 km. Adapun wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan dan penyediaan fasilitas jalan terbagi-bagi. Wewenang Negara sepanjang 43,63 km, pemerintah provinsi 38,45 km dan pemerintah kabupaten/kota di tahun 2019-2020 sepanjang 1 172,78 km, di tahun 2021 data panjang jalan yang termasuk dalam wewenang pemerintah kabupaten/kota mengalami perbedaan yaitu menjadi 1 047,68 km. hal ini dikarenakan data sebelumnya sesuai dengan SK yang berlaku pada 2018-2019, sedangkan untuk data tahun 2021 merupakan hasil survey ulang.

Pejalan kaki adalah pengguna jalan yang butuh ruang khusus agar keamanan dan kenyamanannya dapat terpenuhi. Hal tersebut ditunjang dengan menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung yang juga merupakan hak dari pejalan kaki, seperti trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lainnya. kurang memadainya trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki dan kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi keluhan bagi pejalan kaki karena tidak terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.

UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 22 Tahun 2009 menjadi landasan hukum yang menjelaskan pentingnya penataan jalur pejalan kaki. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang ketentuan rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana pejalan kaki harus disediakan oleh perencanaan kota. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jika setiap jalan yang digunakan untuk angkutan umum harus dilengkapi dengan perlengkapan jalan, termasuk fasilitas untuk pejalan kaki. Selain itu, instansi terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2014 tentang pedoman perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan.

Fasilitas pejalan kaki di kota Bandung belum tersedia merata di semua jalan, dimana kondisi trotoar atau jalur pejalan kaki tidak terawat hingga rusak. Fenomena tersebut mengakibatkan pejalan kaki tidak bisa menggunakan fasilitasnya sehingga memaksa menggunakan jalur kendaraan bermotor yang beresiko keselamatan dari pejalan kaki. Sebagaimana data dibawah ini menunjukkan bahwa masih banyaknya kondisi trotoar sebagai jalur pejalan kaki mengalami kerusakan,

Tabel 1. 2
Data Kondisi Trotoar Rusak di Kota Bandung

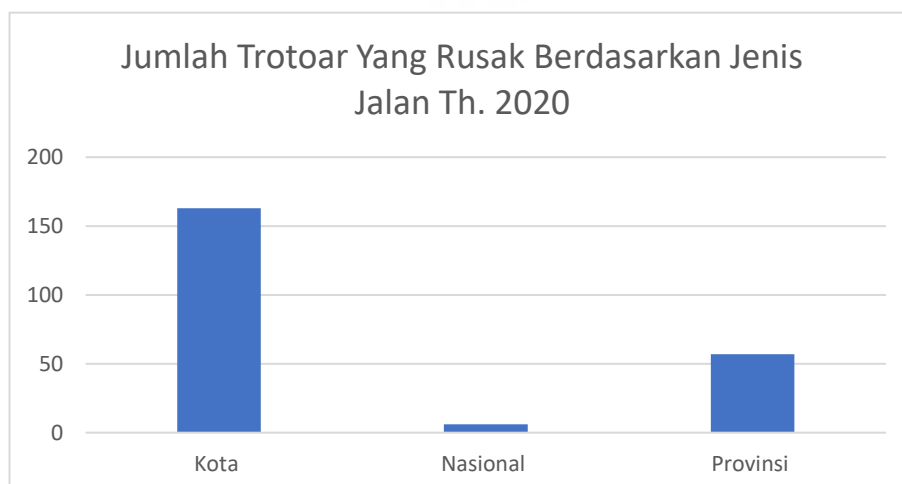
No	Kecamatan	Jumlah Trotoar Rusak
1.	Astanaanyar	1
2.	Bandung Wetan	1
3.	Kec. Astanaanyar	50
4.	Kec. Bandung Wetan	10
5.	Kec. Batununggal	1
6.	Kec. Cibeunying Kaler	3

7.	Kec. Cicendo	7
8.	Kec. Lengkong	4
9.	Kec. Regol	111
10.	Kec. Sukajadi	5
11.	Kec. Sumur Bandung	7
12.	Kec. Coblong	24
13.	Regol	2
Jumlah		226

Sumber: Laporan Aksesibilitas Trotoar Kota Bandung

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa secara keseluruhan kondisi trotoar yang rusak di kota Bandung pada tahun 2020 berjumlah 226 yang berada diberbagai kecamatan. Jumlah tersebut terbagi kedalam beberapa jenis jalan sesuai dengan tingkat kewenangannya yaitu jalan nasional yang merupakan wewenang pemerintah negara dalam hal ini kementerian, jalan provinsi diatas wewenang pemerintah provinsi dan jalan kota yang dalam naungan pemerintah kota. Dapat dilihat data berikut ini:

Tabel 1. 3
Jumlah Trotoar yang Rusak Berdasarkan Jenis Jalan
di Kota Bandung Th. 2020



Sumber: Laporan Aksesibilitas Trotoar Kota Bandung 2020

Melihat data tersebut, dapat dikatakan bahwa kondisi trotoar rusak di jalan kota lebih banyak dibandingkan dengan jalan nasional dan provinsi yaitu berjumlah 163 titik, sedangkan di jalan nasional terdapat 6 titik dan jalan nasional 57 titik. Dengan demikian jumlah keseluruhan kondisi trotoar rusak di kota Bandung pada tahun 2020 mencapai 226 trotoar rusak. Berikut dokumentasi terkait kondisi trotoar yang mengalami kerusakan:

Gambar 1. 1
Kondisi Trotoar yang Rusak



Dilansir dari Detikjabar Jumat, 04 November 2022 Pukul 14.30 WIB menjelaskan bahwa kondisi trotoar di Kota Bandung jauh dari kata sempurna, terdapat sejumlah titik trotoar yang rusak hingga diinvasi pedagang kaki lima. Banyak warga yang mengeluhkan kondisi tersebut, pasalnya rusaknya trotoar sangat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Hal ini juga diungkapkan seorang warga bernama Erpan yang menyebut hanya Sebagian saja trotoar di Bandung berfungsi maksimal, terutama di kawasan jalan Protokol atau pusat Kota Bandung. Sementara di beberapa bagian kondisinya begitu memprihatinkan. Ada yang rusak,

ada pula yang dimanfaatkan untuk pedagang. Ia juga mengatakan banyak trotoar yang kondisinya retak-retak, untuk itu ia mengharapkan agar Pemkot menganggarkan perbaikan trotoar. Sebab, trotoar adalah wajah penataan kota (Wamad, 2022).

Beberapa titik yang menjadi tujuan kebanyakan masyarakat Bandung dan kota untuk berwisata, belanja ataupun melanjutkan pendidikannya yaitu Jalan Asia Afrika menjadi referensi tempat wisata di Bandung. Letaknya yang sangat strategis berada di tengah kota Bandung sehingga jalan ini sangat ramai para wisatawan. Jalan Cihampelas menjadi pusat perhatian para wisatawan yang ingin berbelanja jeans, adanya kawasan sentra jeans menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung untuk datang berbelanja sekaligus berwisata. Dan Jalan Dipatiukur sebagai salah satu jalan kolektor sekunder di Kota Bandung. Perkembangan ekonomi di Jalan Dipatiukur berkembang dengan sangat pesat seiring dengan hadirnya beberapa kampus negeri maupun swasta, seperti Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Komputer Indonesia (Unikom), dan Institut Teknologi Harapan Bangsa (ITHB). Jalan-jalan tersebut tingkat pergerakan aktivitas dan mobilitas kendaraan yang cukup tinggi sehingga perlu diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pejalan kaki yang nyaman dan aman bagi pejalan kaki. Nilai kenyamanan trotoar akan menjadi pendorong pejalan kaki untuk berjalan

Dengan demikian, perlunya kebijakan dari pemerintah kota Bandung dalam mengatasi permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat. Menurut Thomas Dye dalam (subarsono) kebijakan publik diartikan sebagai sesuatu yang menjadi

pilihan pemerintah untuk bertindak ataupun tidak. Jika pemerintah memilih bertindak, maks *goal* (tujuan objektifnya) harus diutamakan dan merupakan keseluruhan tindakan, dalam arti tidak hanya perwujudan keinginan pemerintah saja.

Sebagai kota besar dan juga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, masalah sosial dan lingkungan di kota Bandung tidak bisa terlepas. Kota ini menjadi tujuan pariwisata dan pendidikan, disamping itu pesatnya perkembangan kota Bandung yang juga diiringi meningkatnya jumlah kendaraan disebabkan kunjungan para wisatawan atau para pelajar yang hendak melanjutkan pendidikan, yang berdampak pada timbulnya kemacetan dan ketidaktertiban lalu lintas menjadi keluhan masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan perlunya peningkatan ruang jalan, termasuk memprioritaskan jalur pejalan kaki karena dalam pengembangan kota kenyamanan dan keamanan pejalan kaki merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Evaluasi Kebijakan Pemeliharaan Trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu upaya dalam mendeteksi suatu permasalahan yang ada, seperti beberapa masalah yang telah dijelaskan dalam latar belakang menghasilkan identifikasi masalah yaitu:

1. Ruang bagi pejalan kaki semakin terpinggirkan sehingga ketersediaannya tidak memenuhi kebutuhan pergerakan pejalan kaki.
2. Kurang memadainya trotoar yang merupakan fasilitas pejalan kaki dan kurangnya perhatian dari pemerintah menjadi keluhan bagi pejalan kaki karena tidak terciptanya kondisi yang aman dan nyaman.
3. Trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki di kota Bandung belum tersedia merata di semua jalan, dimana kondisi trotoar atau jalur pejalan kaki tidak terawat hingga rusak. Fenomena tersebut mengakibatkan pejalan kaki tidak bisa menggunakan fasilitasnya sehingga memaksa menggunakan jalur kendaraan bermotor yang beresiko keselamatan dari pejalan kaki.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauhmana efektivitas kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
2. Apakah efisien kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kota Bandung?
3. Sejauhmana kecukupan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
4. Bagaimana pemerataan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?

5. Bagaimana responsivitas kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
6. Sejauhmana ketepatan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Efektivitas kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
2. Efisiensi kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga kota Bandung?
3. Kecukupan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
4. Pemerataan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
5. Responsivitas kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?
6. Ketepatan kebijakan pemeliharaan trotoar pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung?

E. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya mampu memberikan manfaat bagi pembaca

Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan antara lain yaitu:

a. Secara Teoretis

1. Bagi penulis: harapan dalam penelitian ini yaitu agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam cakupan administrasi publik, juga mampu mendukung untuk mengembangkan wawasan pentingnya peran serta sarana dan fasilitas pejalan kaki dalam mendukung perkembangan fasilitas di Kota Bandung.
2. Bagi instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung dalam peenyediaan dan perbaikan sarana dan fasilitas pejalan kaki.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis. Hasil dari peneletian ini merupakan sebuah bentuk penerapan ilmu yang sudah didapat sebagai mahasiswa Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bagi instansi terkait. Hasil dari penelitian ini menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan oleh pemerintah Kota Bandung dalam membuat dan Menyusun kebijakan.

F. Kerangka Pemikiran

Kebijakan termasuk proses dari administrasi yang ditujukan sebagai solusi dalam mengatasi dan menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat. Menurut Easton dalam (Yuaningsih, 2016) mengartikan kebijakan publik sebagai pendistribusian nilai kekuasaan yang bersifat mengikat bagi semua masyarakat. Tindakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan merepresentasikan pilihan yang diambil pemerintah.

Evaluasi dalam studi kebijakan publik termasuk tahapan dalam proses kebijakan publik. Maksud dari adanya tahapan evaluasi sebagai bentuk penilaian apakah suatu kebijakan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan teknis sudah ditetapkan. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan evaluasi program/kebijakan itu berbeda-beda yang tentunya dapat mempengaruhi indikator yang digunakan, yaitu:

- a) Pendekatan yang didasarkan dasar evaluasi;
- b) Pendekatan yang didasarkan pada sistem penilaian yang diacu;
- c) Pendekatan yang didasarkan pada kriteria evaluasi.

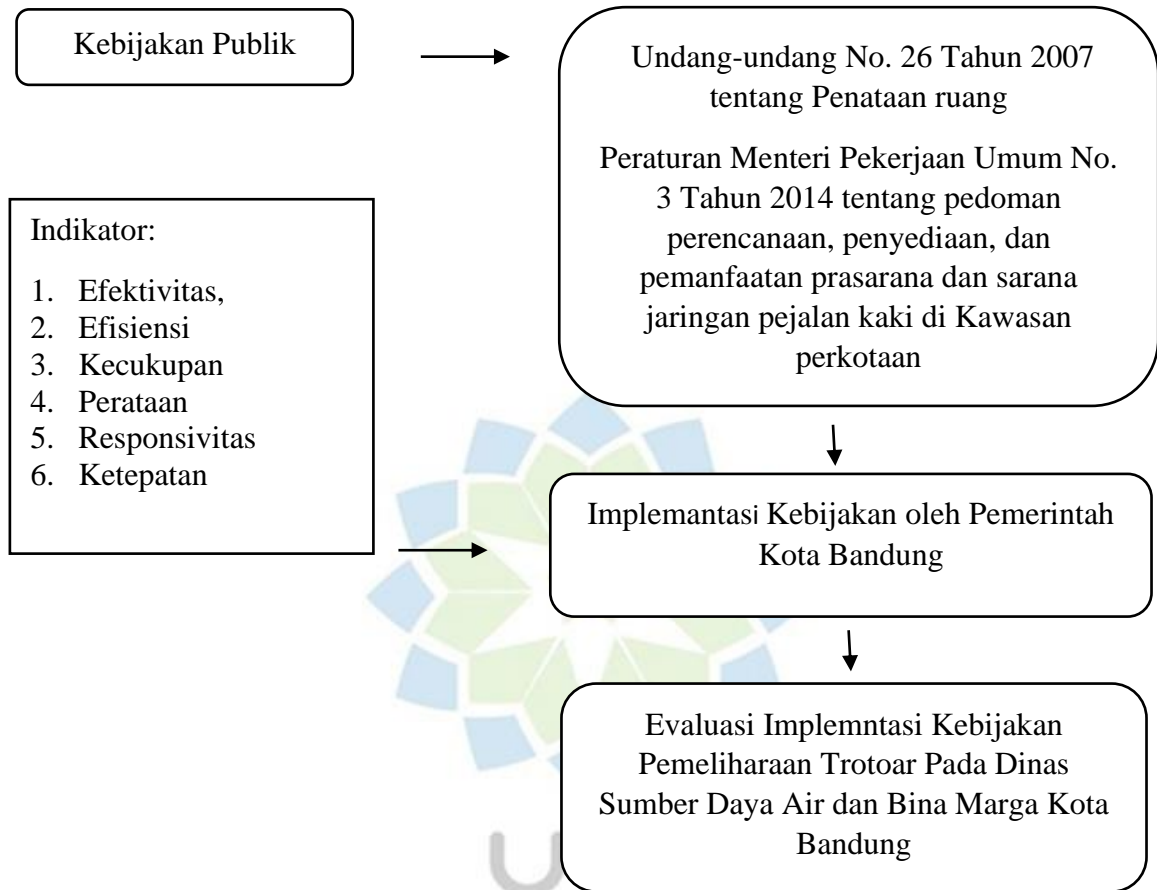
Kriteria Evaluasi berdasarkan pendapat (Dunn, 1999) yang menjadi indikator atau acuan dalam kebijakan publik antara lain:

1. Efektivitas, yang berkaitan dengan hal ini yaitu memiliki esensi dalam keberhasilan dan pencapaian yang menjadi tujuan yang telah direncanakan.
2. Efisiensi, dalam hal ini berkaitan dengan adanya hubungan antara usaha dan efektivitas.
3. Kecukupan, dapat diukur dengan sebuah kemanfaatan dan kepuasan pada kebutuhan yang dinilai efektif.

4. Perataan, meratanya sebuah sistem kebijakan erat kaitannya dengan rasionalisasi antara legal dan sosial serta merujuk pada distribusi diantara usaha-usaha kelompok yang terdapat pada masyarakat tersebut.
5. Responsivitas, berkaitan dengan tingkat kepuasan kebutuhan dalam suatu kebijakan, dengan nilai pada kelompok masyarakat tersebut.
6. Ketepatan, dapat dilihat pada dekatnya hubungan rasionalitas substantif yang dilihat pada nilai atau harga dari tujuan program serta pada asumsi yang kuat dari landasan tujuan kebijakan tersebut.



Gambar 1. 2
Bagan Kerangka Berpikir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
Sumber : Dunn (1999:160)3